



**PEMERINTAH KOTA BATAM**

**RANCANGAN PERUBAHAN**

**RENCANA KERJA (RENJA)**

**TAHUN 2024**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB)  
KOTA BATAM TAHUN 2024**

# KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Batam ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 menyesuaikan dengan kondisi berjalan pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2024 yang pelaksanaannya sudah berorientasi hasil dan implementasi seluruh program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Batam tetap berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Batam telah berjalan dengan baik dan membuahkan hasil namun dalam rangkap penyesuaian pencapaian target kinerja terhadap kondisi berjalan perlu disusun Rancangan perubahan Rencana Kerja agar target yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2024.

Semoga Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 bermanfaat bagi pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Batam.

Batam, 25 Juli 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk  
Dan keluarga Berencana Kota Batam



*[Handwritten signature]*  
Nyvi Harnadyastuti, S.Sos  
NIP. 19761128 200212 2 006

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
-------------------------	----------

<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
---------------------------------	----------

1.1. Latar Belakang.....	1
--------------------------	---

1.2. Landasan Hukum .....	3
---------------------------	---

1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
-----------------------------	---

1.4. Sistematika Penulisan .....	8
----------------------------------	---

<b>BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 S.D TRIWULAN II</b> .....	<b>10</b>
---	-----------

2.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 s.d Triwulan II dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	12
--	----

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
---	----

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	28
---	----

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	88
--	----

<b>BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>89</b>
--	-----------

3.1. Program dan Kegiatan Tahun 2024 .....	96
--	----

<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	<b>120</b>
------------------------------	------------

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap OPD harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu yang berpedoman pada RPJMD.

Dengan dikeluarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Dengan berlakunya kedua undang-undang tersebut di atas membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Sebagai perwujudan dari semangat Otonomi Daerah, serta mengacu kepada UUD 1945 pasal 27 tentang persamaan hak dan kewajiban setiap warga Negara tidak ada kecualinya, Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, dan Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan Nasional, kemudian adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang (PTPPO), Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga dimana dari latar belakang undang-undang sebagaimana disebutkan diatas bahwa diamanatkan disetiap daerah diwajibkan untuk melaksanakan amanat tersebut sehingga dibutuhkan suatu kelembagaan, oleh karena Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam sebagai lembaga organisasi pemerintahan sangat diperlukan, dan dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam telah diberikan mandat dan wewenang untuk membuat program kebijakan dalam urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kota Batam.

Selain beberapa hal yang telah diuraikan diatas maka latar belakang dibuatnya renja adalah sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan dan bernegara secara terus menerus yang berkesinambungan, dan dalam melaksanakan otonomi daerah perlu dilaksanakan beberapa hal; **pertama** memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan jender melalui kebijakan nasional secara optimal dan memadai sesuai tuntutan umum dari masyarakat agar aparatur pemerintah memenuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. **Kedua** pelayanan prima harus direncanakan dan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi sendi-sendi tata laksana layanan umum terutama untuk meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan perempuan serta Keluarga Berencana dan kesejahteraan keluarga dalam masyarakat.

Dengan adanya tuntutan baru dalam rangka pematapan kemandirian dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sejahtera, maka kedudukan peran perempuan perlu mendapat perhatian, ditingkatkan terus dan dikedepankan terutama di tingkat Kabupaten/Kota karena perempuan merupakan salah satu unsur komponen dari bagian masyarakat yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan yang akan dilaksanakan, Rendahnya pendidikan yang dimiliki kaum perempuan di bidang kesehatan dan kesehatan reproduksi, ekonomi, dan sosial budaya dalam pemerintahan maupun legislatif hal ini selanjutnya akan berdampak kepada pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang Kota Batam ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237) ;
- 4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
  - 5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana
  - 6) Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan
  - 7) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 8) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - 9) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2008 Nomor 54, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 3952);
  - 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak ;
  - 13) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4481);
  - 14) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 tahun 2003 tentang Pengalihan sebagian Tugas Dinas Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ke Pemerintah Daerah (Kabupaten / Kota)
  - 15) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2000 tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan Nasional
  - 16) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Di Daerah Batam
  - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
  - 18) Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024
  - 19) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
  - 20) Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
  - 21) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan

- Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
- 22) Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
  - 23) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Batam
  - 24) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021.
  - 25) Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah.
  - 26) Peraturan Walikota Batam Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
  - 27) Kepmendagri Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
  - 28) Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah
  - 29) Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022
  - 30) Perwako Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2023

- 31) Peraturan Walikota Batam Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026
- 32) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026
- 33) Perwako Perubahan RKPD 2023 Nomor 82 Tahun 2023 Berita Daerah Nomor 11209

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini adalah :

- a. Sinkronisasi antara RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2021-2026 dan Renja dengan mengakomodir Visi, Misi, Program dan Sasaran Kepala Daerah yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan Visi dan Misi Organisasi.
- b. Tersedianya sebuah dokumen perencanaan yang memuat program kerja yang jelas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang akan dijadikan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya.
- c. Untuk memudahkan dalam penetapan dan pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- d. Untuk memberikan arah dan kebijakan terhadap struktur dan pedoman kerja dan pola kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dalam menyusun dokumen perencanaan.
- e. Untuk mensinergikan antara kebijakan dan program yang ada didalam Renstra dengan renja yang disusun setiap tahunnya, dan sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2021 – 2026.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2024:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab Pendahuluan ini berisikan Latar belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum juga bagaimana Sistematika Penulisan Renja ini.

#### **BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2024**

Pada bab II ini diuraikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Triwulan II Tahun 2024.

#### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bab III ini berisikan tentang rincian program dan kegiatan (perubahan)

## BAB IV. PENUTUP

Lampiran

*SK Tim RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Tahun 2023*

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 s.d TRIWULAN II 2024**

Sesuai dengan Rencana Kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam berkewajiban untuk mencapai target-target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja Instansi. Tolok ukur keberhasilan kinerja tersebut mengacu pada ketercapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam dan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Kota Batam
- b. Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak
- c. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk
- d. Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga

Keempat sasaran yang ingin dicapai tersebut pada Tahun 2023 mempedomani Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 tentang Perubahan atas keputusan Mendagri Nomor: 050.5883 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan dituangkan melalui 10 program, 20 Kegiatan dan 42 sub kegiatan mendasar yang secara umum pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dan berorientasi pada ketercapaian sasaran dimaksud. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian Rencana Kinerja dan sebagai bahan evaluasi Akuntabilitas Kinerja digambarkan capaian-capaian kinerja pada tahun 2023 yang berkorelasi dengan RPJMD 2021-2026 dan proyeksi pelaksanaan program kegiatan tahun 2022 mempedomani Renstra Tahun 2021-2026. Di bawah ini diuraikan hasil capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2023 dari Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2023 dan capaian kegiatan berjalan sampai dengan periode Triwulan II yang diperoleh dalam analisa pelayanan perangkat daerah tahun 2024 menyesuaikan dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2021-2026.

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DP3APPKB Tahun 2024 dan Capaian RENSTRA  
DP3APPKB**

**Tabel T-C.29.  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas  
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga  
Berencana s/d Tahun 2024 Kota Batam**

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 telah berjalan dengan baik. Mayoritas kegiatan DP3AP2KB yang bersentuhan dengan masyarakat terkait pelayanan telah terlaksana sesuai yang diharapkan. Sebagai berikut gambaran pelaksanaan pada masing-masing program, kegiatan dan Sub kegiatan pada tahun 2023.

### **2.2.1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

Melalui Program Peningkatan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berupaya mewujudkan kualitas hidup, dan potensi perempuan untuk mendorong pertumbuhan taraf hidup masyarakat kota Batam. Dalam capaian program ini diwujudkan langkah-langkah progresif untuk memacu peran aktif perempuan terlibat langsung dalam mengatasi persoalan-persoalan perempuan untuk melangsungkan kehidupan yang berkesinambungan baik dari segi ekonomi, edukasi, budaya dan sosial yang mendorong peningkatan kualitas hidup keluarga secara umumnya.

1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan melalui 77 Tim Penggerak PKK yang dibentuk dalam upaya pencapaian Keluarga harmonis dan sejahtera. Sepanjang Tahun 2023 kegiatan ini telah terlaksana dengan baik. Pembinaan akhlak mulia bagi kader dan pengurus PKK sebanyak 5100 orang di 12 Kecamatan yang bertujuan untuk meningkatkan moral dan spiritual perempuan dalam keluarga. Kegiatan ini dipandang perlu untuk menumbuhkan jiwa kebersamaan sesama dalam upaya mencapai keselarasan hidup bermasyarakat dalam keberagaman. Demikian halnya melalui kegiatan ini juga telah terlaksana HKG PKK, Halal Bi Halal dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Perempuan melalui Pelatihan Kuliner, Pelatihan Tata Rias yang melibatkan 21.062 orang perempuan Kota Batam yang memberikan semangat dan motivasi dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga sehingga mampu berkontribusi dan berperan aktif dalam membangun ekonomi kota Batam. Pelatihan ini mencakup Pelatihan Tataboga/Kuliner bagi 3517 orang, pelatihan tata rias bagi 630 orang dan pelatihan Publik Speaking bagi 1065 orang perempuan Kota Batam. Dengan metode ini perempuan Kota Batam khususnya ibu rumah tangga ekonomi lemah dapat memiliki daya cipta dan menghasilkan produk yang bernilai jual di pasaran sehingga meningkatkan taraf hidup keluarga yang berperan dalam menggerakkan roda ekonomi dan pembangunan Kota Batam. Capaian Realisasi Keuangan kegiatan ini 97.23% dengan pencapaian fisik kegiatan sebesar 100%.

### **2.2.2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Melalui program ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berupaya mewujudkan kualitas hidup perempuan yang berhaluan pada kesetaraan gender dan peningkatan akses publik bagi kaum perempuan dalam berbagai bidang pembangunan. Perempuan diberikan pembekalan dalam upaya peningkatan kompetensi dan wawasan pembangunan yang turut andil setara dengan kaum laki-laki. Sasaran kegiatan ini pada akhirnya mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pembangunan Gender Kota Batam yang pada tahun 2023 di proyeksikan pada angka IPG 94.46 dan IDG 58.50 dan pencapaian IPG Kota Batam pada tahun 2023 sebesar 94.75 sedangkan IDG Kota Batam sebesar 58.65. Program ini dituangkan dalam 2 kegiatan yaitu:

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten/Kota

Melalui Kegiatan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam mengupayakan penerapan kesetaraan gender di Kota Batam. Tujuan kegiatan ini agar setiap kegiatan/program OPD memuat atau merumuskan

cakupan-cakupan keselarasan gender dalam kegiatan yang dilaksanakan masing-masing OPD. Melalui kegiatan ini terlaksana pelatihan PPRG(GAB/GBS) bagi perencana se-kota Batam. Dan capaian Anggaran Responsif Gender tercapai pada angka 10.40% dari total belanja langsung APBD kota Batam (sebesar Rp. 342.810.964.575,- dari total belanja langsung Rp. 3.298.348.071.263) Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar 91.51% dan capaian fisik sebesar 100%.

## 2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Sub kegiatan

### a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Melalui kegiatan ini telah terlaksana pelatihan Tata Rias bagi 630 orang Ibu rumah tangga yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kompetensi dan keterampilan kaum perempuan yang mendukung peningkatan ekonomi keluarga sejahtera. Demikian halnya terlaksana Talkshow kesehatan bagi 220 orang perempuan bersamaan dengan peringatan Hari Kartini dengan tujuan untuk meningkatkan semangat perjuangan kaum perempuan dalam menggali potensi dan sumberdaya di berbagai bidang pembangunan berbangsa dan bermasyarakat. Capaian fisik kegiatan ini adalah 100 % dengan realisasi anggaran sebesar 98.18%.

### **2.2.3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**

Program ini dilaksanakan dalam upaya penyediaan basis data gender dan anak yang mengakomodir pelaksanaan Anggaran Responsif Gender GAB/GBS dalam pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kota Batam. Dan dilaksanakan melalui kegiatan

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Pada tahun 2023 Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dengan anggaran yang terealisasi sebesar 97.96 % dan capaian fisik kegiatan sebesar 100%. Muatan kegiatan ini mengakomodir Pelatihan dan Penginputan Data PPRG OPD dalam Penggunaan Aplikasi E-SIPUGA. Pelatihan dan Penginputan Data PPRG Kecamatan dalam Penggunaan Aplikasi E-SIPUGA yang diharapkan memberikan pemahaman perangkat daerah dalam merencanakan penganggaran yang berporos pengarusutamaan gender.

#### **2.2.4. Program Perlindungan Perempuan**

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Mengingat tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak, maka dipandang sangat perlu untuk memberikan pemahaman tentang Perda perlindungan Perempuan dan Anak ini kepada masyarakat luas. Sering sekali perempuan dan anak menjadi target dan korban kekerasan yang tak jarang meninggalkan trauma fisik dan psikologis jangka panjang yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tunas generasi bangsa yang produktif. Maka melalui kegiatan ini Dinas pemberdayaan Perempuan berupaya meningkatkan pengetahuan masyarakat baik melalui sosialisasi dan penyuluhan agar hak-hak anak dan perempuan dapat diperoleh sebagaimana mestinya. Dalam Pelaksanaan Kegiatan ini juga melibatkan tim P2TP2A dan Tim KPPAD yang sudah terbentuk dan berperan aktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Secara garis besar kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dalam pencegahan dan penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Sampai dengan akhir 2023 terdapat 43 total kasus kekerasan terhadap perempuan yang sudah ditangani dengan baik. Realisasi kegiatan ini telah mengakomodir pelaksanaan Sosialisasi Perlindungan Anak Kota Batam (3x), Pembekalan Satgas Kelurahan Bebas Kekerasan dan Rapat Koordinasi Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Capaian realisasi keuangan dari kegiatan ini sebesar 90.80 dan realisasi fisik sebesar 100%.

2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar 66.40% dan capaian fisik sebesar 90%

#### **2.2.5. Program Perlindungan Khusus Anak**

Program Perlindungan Khusus Anak Tahun 2023 diakomodir dari belanja Dana Alokasi Khusus (DAK Non Fisik) yang secara umum pelaksanaannya sesuai dengan juknis dari kementerian.

Program ini dituangkan dalam 1 kegiatan utama di bawah ini:

- a. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

Sampai dengan akhir tahun 2023 kekerasan terhadap anak mencapai 132 kasus. Ini adalah angka yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Batam. Diharapkan melalui pelaksanaan kegiatan ini dapat meningkatkan layanan khusus dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan pada anak. Alokasi anggaran kegiatan ini terealisasi sebesar 75.46% dengan realisasi fisik sebesar 90%. Sejumlah persoalan tidak terserapnya anggaran secara maksimal karena penanganan kasus kekerasan tidak sampai

kepada proses medis maupun penanganan medicolegal yang dimuat dalam kerangka anggaran belanja kegiatan ini.

#### **2.2.6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

##### **1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**

###### **a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi dan menjamin keberlangsungan hak-hak anak dalam proses tumbuh kembang baik di bidang pendidikan, sosial dan budaya. Melalui Kegiatan ini tahun 2023 telah terbentuk Forum Anak di 12 Kecamatan se-Kota Batam dan 41 Kelurahan dan Demikian halnya KPPAD Kota Batam sebagai komisi pengawas yang menjadi salah satu substansi kegiatan ini turut berperan aktif dalam mengkampanyekan hak-hak anak dan program-peningkatan kesejahteraan dan tumbuh kembang anak di Kota Batam. Kegiatan ini juga mengakomodir Honorarium KPPAD Kota Batam dan pelaksanaan Penilaian Kota Layak Anak yang pada tahun 2023 mencapai 950 Skor dan meraih peringkat Nindya. Capaian realisasi fisik dari kegiatan ini sampai mencapai 100% dengan alokasi anggaran sebesar 97.64%.

#### **2.2.7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam mencetuskan Program Pembinaan Keluarga Berencana sebagai salah satu program

yang terus akan diwujudkan sesuai dengan yang termaktub dalam RPJMD. Dalam capaian program ini diwujudkan langkah-langkah progresif untuk menekan angka kelahiran penduduk, melaksanakan penyuluhan Keluarga Berencana, dan memberikan pemikiran cerdas terhadap generasi muda Kota Batam tentang bahaya seks bebas, PMS dan HIV/AIDS dan penggunaan obat-obat terlarang (narkoba). Sebagian besar kegiatan dalam program ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pusat. Program ini dituangkan dalam beberapa kegiatan yaitu:

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Realisasi Keuangan 91.68 % dan capaian fisik 100 % melalui pelaksanaan Pelayanan KB Gratis dan penyuluhan KB di kecamatan dan kelurahan Kota Batam.

Dengan menggiatkan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga (KKBPK) masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya melaksanakan program KB dalam keluarga untuk mewujudkan keluarga sejahtera sebagai pilar utama pembangunan kota Batam. Capaian CPR Kota Batam pada tahun 2023 sebesar 82.63 %

b. Pengendalian Program KKBPK

Kegiatan ini mengakomodir media informasi program pembangunan keluarga dan informasi Keluarga Berencana bagi kader KB dan PIK-Remaja Kota Batam. Realiasi Keuangan sebesar 98.90% dan realisasi fisik sebesar 100%.

c. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK

Kegiatan ini mengakomodir Pembayaran Air, Listrik dan Internet untuk Balai Penyuluhan di 12 kecamatan (bulan januari s.d Mei), penyuluhan bagi kader berbasis data kependudukan pada 12 kecamatan. Realiasi Keuangan sebesar 84.15% dan realisasi fisik sebesar 90%

2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

a. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Kegiatan ini mengakomodir Pembinaan Kader PPKBD dan Sub PPKBD pada 12 kecamatan. Dan realisasi keuangan sampai akhir tahun 2023 sebesar 100 % dengan capaian fisik sebesar 100 %.

3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

a. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya. Melalui kegiatan ini Dinas

Pemberdayaan Perempuan telah mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi ke 317 Fasilitas kesehatan KB se-Kota Batam yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah akseptor Aktif KB pada tahun 2023. Realisasi Keuangan sebesar 93.97% dan fisik 100%.

b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Realisasi Keuangan sebesar 43.87 % dan fisik sebesar 85 %

4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

a. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program keluarga berencana dan pembangunan kependudukan baik melalui lokakarya mini maupun penyuluhan program keluarga berencana.

Penggerakan Kampung KB ini merupakan pemetaan penduduk dengan tingkat kelahiran yang tinggi yang perlu dijadikan prioritas program layanan KB yang didukung oleh kader Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB 76 orang), Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD /sub PPKBD 128 orang) sebagai ujung tombak penggerak program KB di kecamatan dan kelurahan.

Realisasi keuangan 89.81 % dan fisik sebesar 95%

### **2.2.8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

#### **1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

- a. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS).

Muatan kegiatan ini berupa pengadaan KIT Siap Nikah Stunting sebanyak 35 Unit dan BKB KIT Stunting sebanyak 25 unit yang diserahkan kepada masyarakat melalui kelompok Bina Keluarga Balita di Posyandu dan sekolah-sekolah yang memiliki jalur PIK-R (Pusat informasi Konseling Remaja) se-kota Batam dalam upaya mensukseskan program pembangunan dan peningkatan kualitas keluarga sejahtera (i bangga). Serapan anggaran kegiatan ini sebesar 65.28% dengan Realisasi fisik kegiatan sebesar 90%

- b. Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Realisasi Keuangan 94.43% dan fisik 100 %

Dalam upaya peningkatan taraf hidup keluarga, sampai dengan Tahun 2023 telah terbentuk sebanyak 430 kelompok kegiatan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga yang menasar ibu rumah tangga yang memiliki keterampilan khusus(baik dalam menjahit, memasak, tata rias dan lainnya) yang dapat dikembangkan dan menghasilkan produk-produk yang bernilai

jual di kalangan masyarakat kota Batam. Melalui kegiatan ini juga terbentuk kelompok tribina sebagai salah satu indikator pencapaian keluarga sejahtera. Sampai dengan tahun 2023 BKB HI terbentuk 179 kelompok, BKL terbentuk 27 kelompok, dan BKR terbentuk 39 kelompok. Untuk membuka wawasan dan pengetahuan remaja di Kota Batam juga dilaksanakan penyuluhan dan pembinaan kepada remaja. Kondisi remaja pada masa kini telah memasuki tahap yang memperhatikan. Terbukanya secara luas sistem jaringan internet telah banyak mempengaruhi pola pikir dan perilaku remaja dewasa ini. Remaja cenderung pasif dan kurang kreatif bahkan kerap kali terjerumus dalam pergaulan bebas dan mengkonsumsi narkoba. Melalui Pembentukan PIK-R di sekolah-sekolah maupun jalur masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Batam dengan gencar memaparkan program remaja yang berencana untuk meraih masa depan gemilang yang bebas dari narkoba dan sex bebas. Sampai dengan tahun 2023 telah terbentuk PIK-R sebanyak 66 kelompok yang diharapkan menjadi pioner bagi remaja Kota Batam dalam mewujudkan remaja cerdas berencana dan unggul.

#### **2.2.9. Program Pengendalian Penduduk**

Program ini memuat kebijakan daerah dalam sistem kependudukan dalam pelaksanaan pembangunan Kota Batam pada periode 5 tahun RPJMD. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat disusun basis data pembangunan kependudukan yang berhaluan kepada penataan wilayah dan akses pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Kota Batam. Program ini diakomodir melalui kegiatan:

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
  - a. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota

Pada tahun 2023 telah disusun dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan yang diharapkan dapat menjadi haluan perencanaan pembangunan yang berbasis kependudukan. Realisasi keuangan sebesar 94.60% dan realisasi fisik 100%.

2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB. Realisasi Keuangan sebesar 95.46%, dan capaian fisik sebesar 100%.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DP3APPKB Kota Batam

No	Indikator Kinerja	SPM /Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catan Analisis
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1 (TR W II)	Tahun n	Tahun n+1	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			94.46 %	94.48 %	94.50 %	94.52 %	94.75 %	49.55 %	94.50 %	94.52 %	
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			58.50%	58.55%	58.60%	58.65 %	58.65 %	43.40 %	58.60 %	58.65 %	
3	Persentase Penurunan kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak			6.0%	6.5%	7.0%	7.5%	Meningkat 23%	4.05%	7.0%	7.5%	
4	Angka Kelahiran Total (TFR)			2.34%	2.32%	2.30 %	2.28%	2.16%	0.96%	2.30 %	2.28 %	
5	Indeks Pembangunan Keluarga			57.26%	57.28%	57.30 %	57.32 %	59.76 %	25.51 %	57.30 %	57.32 %	

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Isu-isu strategis yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

1. Rendahnya kualitas hidup perempuan implikasi dari rendahnya kapasitas SDM perempuan kota Batam
2. Rendahnya Partisipasi Perempuan dalam pembangunan sesuai dengan capaian IDG dalam hal keterwakilan perempuan dalam lembag legislative yang masih belum memenuhi kuota 30 %
3. Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Tingginya minat pencari kerja yang masuk ke Kota Batam meningkatkan jumlah pasangan usia produktif yang rentan terhadap penambahan angka kelahiran penduduk;
5. Luasnya keterbukaan akses informasi dan teknologi yang dilatarbelakangi oleh letak geografis kota Batam sebagai wilayah border /perbatasan rentan terhadap peningkatan kenakalan remaja yang berdampak kepada perilaku seks bebas, penyalahgunaan narkoba dan pernikahan usia dini;
6. Belum optimalnya koordinasi antara Perangkat Daerah dalam upaya menurunkan angka Keluarga Pra Sejahtera I dan Pra Sejahtera II
7. Terbatasnya jumlah penyuluh KB/petugas lapangan KB sebagai koordinator pelaksanaan program bangga kencana di lapangan

## 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

TABEL T-C. 33-3.1

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

## Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tahun 2024	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tahun 2025	Indikator Kinerja Program /Kegiatan (2024 Tahun Rencana)	Indikator Kinerja Program /Kegiatan (2025 Tahun Rencana)	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2)			(3)	(5)	(10)		(8)	(9)	(10)	(11)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					30,293,282,080				22,688,471,387
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					20,571,324,432	PAD			15,238,809,891

<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan</b>		<b>100%</b>	<b>10,874,489,532</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>11,684,977,372</b>
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>		<b>100%</b>	<b>9,152,847,922</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>10,592,778,622</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	44 Orang	9,098,597,922	<b>PAD</b>		62 Orang/bulan	10,592,778,622.00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	54,250,000	<b>PAD</b>			-
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>690,572,250</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>283,449,550</b>

			<b>yang terpenuhi</b>							
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	3 Paket	7,994,000	<b>PAD</b>		2 Paket	6,996,000.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	4 Paket	25,000,750	<b>PAD</b>		3 Paket	47,742,050.00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	6,730,000	<b>PAD</b>		1 Paket	5,838,000.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam	4 Paket	17,438,000	<b>PAD</b>		3 Paket	18,036,000.00

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam	2 Paket	15,944,000	PAD	1 Paket	12,071,000.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	12 Laporan	617,465,500	PAD	12 Laporan	192,766,500.00
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana</b>		<b>100%</b>	<b>167,190,000</b>	PAD	<b>100%</b>	<b>393,938,000.00</b>
—	Pengadaan Mebel	—	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Batam	—	—	PAD	60 Unit	174,338,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	5 Unit	167,190,000	PAD	18 Unit	219,600,000

			yang Disediakan							
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia</b>		<b>100%</b>	<b>686,889,360</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>237,516,200</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam	12 Laporan	112,726,800	<b>PAD</b>		12 Laporan	117,299,400.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam	12 Laporan	574,162,560	<b>PAD</b>		12 Laporan	120,216,800.00

<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana</b>		<b>100%</b>	<b>176,990,000</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>177,295,000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Batam	2 Unit	79,060,000	<b>PAD</b>		2 Unit	79,030,000.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Kota Batam	5 Unit	75,350,000	<b>PAD</b>		7 Unit	80,805,000.00

			Perizinannya						
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam	60 Unit	22,580,000	PAD	26 Unit	17,460,000.00
<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam / Persentase perempuan yang dibina dan berhasil</b>	<b>Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam / Persentase perempuan yang dibina dan berhasil</b>		<b>11,40 / 70%</b>	<b>5,756,634,000</b>	<b>PAD</b>	<b>11,50 / 75%</b>	<b>617,000,000</b>
<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase OPD yang dibina dan berhasil</b>	<b>Persentase OPD yang dibina dan berhasil</b>		<b>75%</b>	<b>86,000,000</b>	<b>PAD</b>	<b>80%</b>	<b>152,000,000</b>

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	35 Dokumen	86,000,000	PAD	35 Dokumen	152,000,000.00
<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perempuan yang dibina</b>	<b>Persentase perempuan yang dibina</b>		<b>75%</b>	<b>5,670,634,000</b>	PAD	<b>80%</b>	<b>465,000,000</b>
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan	Kota Batam	2 Dokumen	5,670,634,000	PAD	12 Dokumen	465,000,000.00

		Kewenangan Kabupaten/Kota	Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota							
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan</b>	<b>Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan</b>		<b>100%</b>	<b>471,054,000</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>220,000,000</b>
<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti</b>	<b>Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti</b>		<b>40%</b>	<b>320,000,000</b>	<b>PAD</b>		<b>40%</b>	<b>220,000,000</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan	Kota Batam	57 Dokumen	320,000,000	<b>PAD</b>		12 Dokumen	220,000,000.00

		Kewenangan Kabupaten/Kota	n Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						
<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	UPTD	<b>Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti /dirujuk</b>			<b>30%</b>	<b>151,054,000</b>			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	UPTD	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			17 Layanan	151,054,000			

<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam</b>	<b>Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam</b>		<b>4.75</b>	<b>2,880,520,000</b>	<b>PAD</b>		<b>5</b>	<b>2,046,312,519</b>
<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase kader PKK dan perempuan yang dibina dan aktif</b>	<b>Persentase kader PKK dan perempuan yang dibina dan aktif</b>		<b>75%</b>	<b>2,880,520,000</b>	<b>PAD</b>		<b>80%</b>	<b>2,046,312,519.00</b>
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	2 Laporan	2,880,520,000	<b>PAD</b>		12 Laporan	2,046,312,519
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan</b>	<b>Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak</b>		<b>75%</b>	<b>67,239,000</b>	<b>PAD</b>		<b>80%</b>	<b>190,000,000</b>

		<b>Kebijakan PUG</b>	<b>dalam pelaksanaan Kebijakan PUG</b>							
<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak yang terupdate dan lengkap</b>	<b>Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak yang terupdate dan lengkap</b>		<b>75%</b>	<b>67,239,000</b>	<b>PAD</b>		<b>80%</b>	<b>190,000,000.00</b>
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	44 Dokumen	67,239,000	<b>PAD</b>		12 Dokumen	190,000,000
<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak</b>	<b>Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak</b>		<b>800</b>	<b>374,999,900</b>	<b>PAD</b>		<b>820</b>	<b>310,000,000</b>

<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Lembaga Layanan Anak yang telah memenuhi standard PHA</b>	<b>Persentase Lembaga Layanan Anak yang telah memenuhi standard PHA</b>		<b>68%</b>	<b>374,999,900</b>	<b>PAD</b>		<b>70%</b>	<b>310,000,000.00</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	5 Dokumen	374,999,900	<b>PAD</b>		5 Dokumen	310,000,000
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	—	<b>Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan</b>		—	—			<b>100%</b>	<b>170,520,000</b>
<b>N.A</b>	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	—	<b>Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti</b>		—	—			<b>75%</b>	<b>101,500,000.00</b>

N.A	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	—	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Batam	—	—			40 orang	101,500,000
<b>N.A</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	—	<b>Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti /dirujuk</b>		—	—			<b>30%</b>	<b>69,020,000</b>
N.A	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota	—	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Kota Batam	—	—			40 Orang	69,020,000

<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>		<b>Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti</b>			<b>100%</b>	<b>146,388,000</b>				
<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>KEG PINDAH KE UPTD</b>	<b>Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti</b>			<b>65%</b>	<b>146,388,000.00</b>				
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan		Kota Batam	55 layanan	146,388,000	DAK BOPPA			
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>					<b>9,721,957,648</b>				<b>7,142,181,496</b>
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>		<b>Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK</b>		<b>50%</b>	<b>315,800,000</b>			<b>60%</b>	<b>358,200,000</b>

<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>		<b>Persentase OPD yang telah mengakomodir rekomendasi GDPK dalam kebijakan</b>		<b>50%</b>	<b>50,000,000</b>			<b>60%</b>	<b>45,000,000</b>
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Batam	1 Dokumen	50,000,000	<b>PAD</b>		1 Dokumen	45,000,000.00
<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber</b>		<b>100%/ 40%</b>	<b>265,800,000</b>			<b>100%/ 50%</b>	<b>313,200,000</b>

			<b>KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi</b>							
Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sistim informasi keluarga	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sistim informasi keluarga		Jumlah Laporan Pembinaan dan penyelenggaraan sistim Informasi Keluarga	Kota Batam	12 Laporan	64,200,000	DAK BOKB		12 Laporan	60,000,000
Pencatatan dan pengumpulan Data Keluarga	Pencatatan dan pengumpulan Data Keluarga		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Batam	1 Laporan	129,600,000	DAK BOKB		12 Laporan	253,200,000.00
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	—	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			12 Dokumen	72,000,000	DAK BOKB			—

<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need</b>	<b>Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need</b>		<b>82.00 / 9</b>	<b>5,483,957,648</b>			<b>83.0 /8.50</b>	<b>4,336,651,600</b>
<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi</b>	<b>Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi</b>		<b>100% / 45%</b>	<b>1,086,634,648</b>			<b>100% / 50%</b>	<b>1,389,203,600.00</b>
Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependuduk	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan	Kota Batam	96 Organisasi	80,000,000	DAK BOKB		96 Organisasi	100,000,000.00

		an, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja							
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Kota Batam	4 Dokumen	302,034,648	<b>PAD</b>		4 Dokumen	190,003,600
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangun	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Kota Batam	1 Dokumen	150,000,000	<b>DAK BOKB</b>		4 Dokumen	100,000,000

		an Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang						
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini	Kota Batam	1 Laporan	156,000,000	DAK BOKB	4 Laporan	180,000,000

			Lokakarya (Minilok)							
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kota Batam	1 Laporan	318,600,000	DAK BOKB		12 Laporan	739,200,000.00
Pengendalian Program KKBPK	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Kota Batam	1 Laporan	80,000,000	DAK BOKB		4 Laporan	80,000,000

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Persentase tenaga lini/kader yang aktif		70%	240,000,000			70%	192,000,000.00
Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Batam	5 Organisasi	112,000,000	DAK BOKB		552 Orang	192,000,000
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/P		Kota Batam	542 Orang	128,000,000	DAK BOKB			—

		enyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)								
—	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	—	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana	Kota Batam	5 Laporan	0			5 Laporan	1,051,974,000.00

			(PKB/PLKB )							
<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Presentas e Faskes yang memenuhi standard pelayanan KB</b>		<b>83%</b>	<b>3,946,823,000</b>			<b>84%</b>	<b>2,596,798,000.00</b>
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke	Kota Batam	12 Laporan	140,400,000	DAK BOKB		12 Laporan	161,100,000

			Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya							
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Batam	600 Orang	2,779,703,000	DAK BOKB		625 Orang	1,383,724,000
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	—	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB		Kota Batam	20 Unit	957,420,000				—
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	—	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk		Kota Batam	1 Laporan	69,300,000				—

		Jaringan dan Jejaringnya								
<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>		<b>Presentase kampung KB yang aktif</b>		<b>70%</b>	<b>210,500,000</b>			<b>70%</b>	<b>158,650,000.00</b>
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaa n Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	Kota Batam	13 Kampung KB	210,500,000			13 Kampung	158,650,000.00

			Keluarga Berencana)							
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif</b>	<b>Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif</b>		<b>55%</b>	<b>3,922,200,000</b>			<b>60%</b>	<b>2,447,329,896.00</b>
<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Persentase kelompok ketahanan Keluarga yang dibina</b>	<b>Persentase kelompok ketahanan Keluarga yang dibina</b>		<b>100%</b>	<b>3,922,200,000</b>			<b>100%</b>	<b>2,447,329,896.00</b>
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha	Kota Batam	20 Unit	360,000,000	DAK BOKB		20 Unit	120,000,000.00

		Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia							
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Kota Batam	12 Laporan	135,000,000	PAD		12 Laporan	94,259,969

Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Kota Batam	350 Orang	3,427,200,000			450 Orang	2,233,069,927.00
	<b>- URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>									<b>307,480,000.00</b>

-	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan</b>						<b>100%</b>	<b>72,000,000</b>
-	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>		-	-	PAD		<b>100%</b>	<b>12,000,000.00</b>
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	-	-	PAD		4 Paket	10,000,000.00
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam	-	-	PAD		2 Paket	2,000,000
-	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>		-	-	PAD		<b>100%</b>	<b>60,000,000.00</b>

			<b>Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah yang terlaksana</b>						
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam	-	-	PAD	1 Unit	60,000,000.00
-	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>		<b>Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan</b>		-	-		<b>100%</b>	<b>77,565,000</b>
-	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti/dirujuk</b>		-	-		<b>30%</b>	<b>77,565,000.00</b>

-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	-	-			17 Layanan	77,565,000
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>		<b>Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan</b>		-	-			<b>100%</b>	<b>157,915,000</b>
	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti</b>		-	-			<b>100%</b>	<b>157,915,000</b>

	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Kota Batam	-				52 Orang	157,915,000
						-	DAK BOPPA			

Tabel 3.2

## Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Sebelum dan Sesudah Perubahan

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
			P-RKPD 2024			RKPD 2024	P-RKPD 2023	RKPD 2024	P-RKPD 2024	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							20,571,324,432	18,075,269,123	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	10,874,489,532	10,935,223,223	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	9,152,847,922	10,127,609,873	

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang	44 Orang	9,098,597,922	10,127,609,873	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	54,250,000	0.00	
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>690,572,250</b>	<b>153,367,750</b>	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	7,994,000	6,996,000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	25,000,750	21,501,750	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6,730,000	4,944,000	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik	4 Paket	4 Paket	17,438,000	8,151,000	

				Kantor yang Disediakan	Kantor yang Disediakan					
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	15,944,000	7,183,000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	617,465,500	104,592,000	
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>167,190,000</b>	<b>48,783,000</b>	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	167,190,000	48,783,000	
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>686,889,360</b>	<b>419,032,600</b>	

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	112,726,800	42,834,600	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	574,162,560	376,198,000	
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>176,990,000</b>	<b>186,430,000</b>	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	79,060,000	86,580,000	

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	75,350,000	83,530,000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	60 Unit	22,580,000	16,320,000	
		<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam / Persentase perempuan yang dibina dan berhasil</b>	<b>Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam / Persentase perempuan yang dibina dan berhasil</b>	<b>11,40 / 70%</b>	<b>11,40 / 70%</b>	<b>5,756,634,000</b>	<b>2,292,036,900</b>	
		<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase OPD yang dibina dan berhasil</b>	<b>Persentase OPD yang dibina dan berhasil</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>86,000,000</b>	<b>34,859,900</b>	

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Dokumen	35 Dokumen	86,000,000	34,859,900	
		<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perempuan yang dibina</b>	<b>Persentase perempuan yang dibina</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>5,670,634,000</b>	<b>2,257,177,000</b>	
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	5,670,634,000	2,257,177,000	

		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan</b>	<b>Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>471,054,000</b>	<b>572,249,000</b>	
		<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti</b>	<b>Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>320,000,000</b>	<b>494,684,000</b>	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	57 Dokumen	57 Dokumen	320,000,000	494,684,000	
		<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang</b>	<b>Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti /dirujuk</b>	<b>Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti /dirujuk</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>151,054,000</b>	<b>77,565,000</b>	

		<b>Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>							
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Layanan	17 Layanan	151,054,000	77,565,000	
		<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam</b>	<b>Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam</b>	<b>4.75</b>	<b>4.75</b>	<b>2,880,520,000</b>	<b>3,226,402,000</b>	
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah	Persentase kader PKK dan perempuan yang dibina dan aktif	Persentase kader PKK dan perempuan yang dibina dan aktif	75%	75%	2,880,520,000	3,226,402,000	

		Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota							
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	2,880,520,000	3,226,402,000	
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG</b>	<b>Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>67,239,000</b>	<b>43,958,000</b>	
		<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat</b>	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat</b>	<b>Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak yang terupdate dan lengkap</b>	<b>Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak yang terupdate dan lengkap</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>67,239,000</b>	<b>43,958,000</b>	

		Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota							
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	44 Dokumen	44 Dokumen	67,239,000	43,958,000	
		<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak</b>	<b>Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>374,999,900</b>	<b>623,145,000</b>	
		<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Lembaga Layanan Anak yang telah memenuhi standard PHA</b>	<b>Persentase Lembaga Layanan Anak yang telah memenuhi standard PHA</b>	<b>68%</b>	<b>68%</b>	<b>374,999,900</b>	<b>623,145,000</b>	

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	374,999,900	623,145,000	
		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan</b>	<b>Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>146,388,000.00</b>	<b>382,255,000</b>	
		N.A	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	N.A	Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	N.A	65%	0.00	101,500,000	Pemetaan Nomenklatur Kegiatan
		N.A	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	N.A	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	N.A	40 SDM	0.00	101,500,000	

		<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti</b>	<b>Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti</b>		<b>65%</b>	<b>146,388,000.00</b>	<b>211,735,000</b>	
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan		55 Layanan	146,388,000.00	53,820,000	
		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan		55 Layanan	146,388,000	157,915,000	
<b>2</b>		<b>N.A</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat</b>	<b>N.A</b>	<b>Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti /dirujuk</b>	<b>N.A</b>	<b>30%</b>	<b>0.00</b>	<b>69,020,000</b>	<b>Pemetaan Nomenklatur Kegiatan</b>

			<b>Daerah Kabupaten/Ko ta</b>							
		N.A	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	N.A	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	N.A	40 SDM	<b>0.00</b>	69,020,000	
		<b>URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>					<b>9,721,957,648. 00</b>	<b>8,565,753,499</b>	
		<b>PROGRAM PENGENDALI AN PENDUDUK</b>	<b>PROGRAM PENGENDALI AN PENDUDUK</b>	<b>Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK</b>	<b>Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>315,800,000.00</b>	<b>333,900,000</b>	

		<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Persentase OPD yang telah mengakomodir rekomendasi GDPK dalam kebijakan</b>	<b>Persentase OPD yang telah mengakomodir rekomendasi GDPK dalam kebijakan</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>50,000,000</b>	<b>20,700,000</b>	
		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	20,700,000	
		<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang</b>	<b>Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang</b>	<b>100%/40%</b>	<b>100%/40%</b>	<b>265,800,000.00</b>	<b>313,200,000</b>	

				mendapatkan sosialisasi	mendapatkan sosialisasi					
		Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sistim informasi keluarga	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sistim informasi keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan penyelenggaraan sistim Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan penyelenggaraan sistim Informasi Keluarga	12 Laporan	12 Laporan	64,200,000.00	60,000,000	
		Pencatatan dan pengumpulan Data Keluarga	Pencatatan dan pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	129,600,000.00	253,200,000	
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	N.A	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	N.A	12 Dokumen	0	72,000,000.00	0.00	
		<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need</b>	<b>Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need</b>	<b>82.00 / 9</b>	<b>82.00 / 9</b>	<b>5,483,957,648</b>	<b>4,637,533,499</b>	

		<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi</b>	<b>Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi</b>	<b>100% / 45%</b>	<b>100% / 45%</b>	<b>1,086,634,648.00</b>	<b>1,389,203,600</b>	
		Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Kepada Stake Holder dan Mitra kerja	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Kepada Stake Holder dan Mitra kerja	96 Organisasi	96 Organisasi	80,000,000.00	100,000,000	
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga,	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga,	4 Dokumen	4 Dokumen	302,034,648.00	190,003,600	

				Kependudukan , dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kependudukan , dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal					
		Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokume n	1 Dokume n	150,000,000.00	100,000,000	
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat	1 Laporan	1 Laporan	156,000,000.00	180,000,000	

				Koordinasi Desa (Rakordes) dan mini Lokakarya (Minilok)	Koordinasi Desa (Rakordes) dan mini Lokakarya (Minilok)					
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan , dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan , dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	1 Laporan	318,600,000	739,200,000	
		Pengendalian Program KKBPK	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	1 Laporan	80,000,000.00	80,000,000	
		<b>Pendayaguna an Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>Pendayaguna an Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>Persentase tenaga lini/kader yang aktif</b>	<b>Persentase tenaga lini/kader yang aktif</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>	<b>240,000,000.00</b>	<b>1,544,855,899</b>	

		Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan , dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan , dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	5 Organisasi	5 Organisasi	112,000,000.00	192,000,000.00	
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	N.A	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	N.A	542 Orang	0	128,000,000.00	0.00	

	N.A	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	N.A	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	N.A	5 Laporan	0	1,352,855,899	<b>Pemetaan Nomenklatur Kegiatan</b>
	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Presentase Faskes yang memenuhi standard pelayanan KB</b>		<b>83%</b>	<b>3,946,823,000.00</b>	<b>1,544,824,000</b>	

		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		12 Laporan	140,400,000	161,100,000	
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		600 Orang	2,779,703,000	1,383,724,000	
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	N.A	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	N.A	20 UNIT	0	957,420,000	0	
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	N.A	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk	N.A	1 Laporan	0	69,300,000	0	

				Jaringan dan Jejaringnya						
		<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>Presentase kampung KB yang aktif</b>	<b>Presentase kampung KB yang aktif</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>	<b>210,500,000</b>	<b>158,650,000</b>	
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan	13 Kampung KB	13 Kampung KB	210,500,000	158,650,000	

				, dan Keluarga Berencana)	, dan Keluarga Berencana)					
			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif</b>	<b>Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif</b>	<b>55%</b>	<b>3,922,200,000</b>	<b>3,594,320,000</b>	
			<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Persentase kelompok ketahanan Keluarga yang dibina</b>	<b>Persentase kelompok ketahanan Keluarga yang dibina</b>	<b>100%</b>	<b>3,922,200,000</b>	<b>3,594,320,000</b>	

			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	20 Unit	360,000,000	120,000,000	
--	--	--	---	---	--	--	---------	-------------	-------------	--

			Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKA)	12 Laporan	135,000,000	47,120,000	
--	--	--	--	--	---	--	------------	-------------	------------	--

			Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan	350 Orang	3,427,200,000	3,427,200,000	
<b>TOTAL PAGU</b>								<b>30,293,282,080.00</b>	<b>26,641,022,622.00</b>	

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**TABEL T-C. 32**

**Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024  
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana Kota Batam**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	cat
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

### BAB III

#### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diwujudkan melalui 10 (Sepuluh) program sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
5. Program Perlindungan Perempuan
6. Program Perlindungan Khusus Anak
7. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
10. Program Pengendalian Penduduk

Namun demikian, dari sepuluh program tersebut terdapat 1 (satu) program yang merupakan program rutin Setiap OPD, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Sehingga yang menjadi program inti dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam ada 9 (Sembilan) yaitu:

1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

2. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
4. Program Perlindungan Perempuan
5. Program Perlindungan Khusus Anak
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
9. Program Pengendalian Penduduk

Program-program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana diimplementasikan dalam bentuk beberapa kegiatan, yaitu:

1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, yang dilaksanakan dalam satu kegiatan yaitu :
  - a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan satu sub kegiatan, yaitu:
    - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, yang dilaksanakan menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu:
  - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota

- B. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
- 3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, yang dilaksanakan dalam 1 (satu) kegiatan yaitu:
  - a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
- 4. Program Perlindungan Perempuan
  - a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 5. Program Perlindungan Khusus Anak
  - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
    - Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA

- b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
  - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
    - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
    - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal
    - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
    - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)

- Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
  - Pengendalian Program KKBPK
- b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
- Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
  - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
- C. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
- Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan jejaringnya
  - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
  - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
- D. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

#### 9. Program Pengendalian Penduduk

- a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
  - Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
- b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
  - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
  - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan merupakan salah satu program yang mendukung isu strategis pembangunan kota Batam periode 2021-2026 terkait penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan yang memegang peran penting dalam upaya peningkatan peran aktif perempuan dalam meningkatkan perekonomian dan kapasitas SDM perempuan kota Batam.

Demikian halnya melalui Program Pengendalian Penduduk, Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam berupaya memperbaiki taraf hidup keluarga yang masih rendah dan memberikan wawasan yang luas kepada masyarakat, Meningkatkan kualitas dan pembinaan pembangunan ketahanan keluarga dalam upaya peningkatan kualitas ketahanan keluarga dan Meningkatkan kuantitas dan kualitas peserta KB, Meningkatkan akses, kualitas pelayanan KB, Kesehatan Reproduksi yang merata, Meningkatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, Meningkatkan kampanye pendewasaan usia perkawinan, menyediakan data primer tahapan keluarga di Kota Batam.

### 3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2024

Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 :

**Tabel 5.02.01**  
**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (APBD 2023)	APBD 2024			P-RKPD 2024			Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU APBD 2024	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU P-RKPD 2024	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				21,417,353,022			18,075,269,123	

2.08.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan</b>		100%	11,712,814,122		100%	10,935,223,223	
2.08.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>		100%	10,753,519,772		100%	10,127,609,873	
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	44 Orang	10,753,519,772	Kota Batam	44 Orang	10,127,609,873	Penyesuaian Jumlah Pegawai Mutasi, Pensiun
2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	12 Dokumen	0.00	Kota Batam	12 Dokumen	0.00	
2.08.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	Kota Batam	100%	198,946,550	Kota Batam	100%	153,367,750	

2.08.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	3 Paket	6,996,000	Kota Batam	3 Paket	6,996,000	
2.08.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	4 Paket	19,283,050	Kota Batam	4 Paket	21,501,750	Menyesu aikan kebutuh an keg.berja lan
2.08.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	4,944,000	Kota Batam	1 Paket	4,944,000	
2.08.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam	4 Paket	12,986,000	Kota Batam	4 Paket	8,151,000	Menyesu aikan kebutuh an keg.berja lan
2.08.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam	2 Paket	11,971,000	Kota Batam	2 Paket	7,183,000	Menyesu aikan kebutuh an keg.berja lan
2.08.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	12 Laporan	142,766,500	Kota Batam	12 Lapora n	104,592,000	Menyesu aikan kebutuh an keg.berja lan

<b>2.08.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana</b>	Kota Batam	100%	68,095,000	Kota Batam	100%	48,783,000	
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam	5 Unit	68,095,000	Kota Batam	5 Unit	48,783,000	Menyesuaikan kebutuhan ke.g.berjalan
<b>2.08.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia</b>	Kota Batam	100%	519,482,800	Kota Batam	100%	419,032,600	
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam	12 Laporan	37,827,600	Kota Batam	12 Laporan	42,834,600	Menyesuaikan kebutuhan ke.g.berjalan
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam	12 Laporan	481,655,200	Kota Batam	12 Laporan	376,198,000	Menyesuaikan kebutuhan ke.g.berjalan

2.08.01. 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana</b>	Kota Batam	100%	172,770,000	Kota Batam	100%	186,430,000	
2.08.01.2 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Batam	2 Unit	79,060,000	Kota Batam	2 Unit	86,580,000	Menyes uaikan kebutuh an keg.berja lan
2.08.01.2 .09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Batam	5 Unit	76,250,000	Kota Batam	5 Unit	83,530,000	Menyes uaikan kebutuh an keg.berja lan
2.08.01.2 .09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam	60 Unit	17,460,000	Kota Batam	60 Unit	16,320,000	

2.08.02	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam / Persentase perempuan yang dibina dan berhasil</b>	Kota Batam	<b>11,40 / 70%</b>	<b>5,353,485,900</b>	Kota Batam	<b>11,40 / 70%</b>	<b>2,292,036,900</b>	<b>Efisiensi Anggaran</b>
2.08.02.2.01	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase OPD yang dibina dan berhasil</b>	Kota Batam	<b>75%</b>	<b>34,859,900</b>	Kota Batam	<b>75%</b>	<b>34,859,900</b>	
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	35 Dokumen	34,859,900	Kota Batam	35 Dokumen	34,859,900	
2.08.02.2.02	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan</b>	<b>Persentase perempuan yang dibina</b>	Kota Batam	<b>75%</b>	<b>5,318,626,000</b>	Kota Batam	<b>75%</b>	<b>2,257,177,000</b>	

	<b>Kabupaten/Kota</b>								
2.08.02.2 .02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kabupaten/Kota	Kota Batam	2 Dokumen	5,318,626,000	Kota Batam	2 Dokumen	2,257,177,000	Efisiensi Anggaran
2.08.03	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan</b>	Kota Batam	100%	467,509,000	Kota Batam	100%	572,249,000	
2.08.03. 2.01	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti</b>	Kota Batam	40%	389,944,000	Kota Batam	40%	494,684,000	

2.08.03.2 .01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	57 Dokumen	389,944,000	Kota Batam	57 Dokumen	494,684,000	Peningkatan Layanan Sosialisasi dan Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
2.08.03.2.02	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti /dirujuk</b>	Kota Batam	30%	77,565,000	Kota Batam	30%	77,565,000	
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan	Kota Batam	17 Layanan	77,565,000	Kota Batam	17 Layanan	77,565,000	

	Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota							
<b>2.08.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam</b>	Kota Batam	<b>4.75</b>	<b>2,961,751,000</b>	Kota Batam	<b>4.75</b>	<b>3,226,402,000</b>	
<b>2.08.04.2.01</b>	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase kader PKK dan perempuan yang dibina dan aktif</b>	Kota Batam	<b>75%</b>	<b>2,961,751,000</b>	Kota Batam	<b>75%</b>	<b>3,226,402,000</b>	
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	2 Laporan	2,961,751,000	Kota Batam	2 Laporan	3,226,402,000	
<b>2.08.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN</b>	<b>Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan</b>	Kota Batam	<b>75%</b>	<b>43,958,000</b>	Kota Batam	<b>75%</b>	<b>43,958,000</b>	

	<b>ANAK</b>	<b>Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG</b>							
<b>2.08.05.2.01</b>	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak yang terupdate dan lengkap</b>	Kota Batam	<b>75%</b>	<b>43,958,000</b>	Kota Batam	<b>75%</b>	<b>43,958,000</b>	
<b>2.08.05.2.01.0002</b>	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	44 Dokumen	43,958,000	Kota Batam	44 Dokumen	43,958,000	
<b>2.08.06</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak</b>	Kota Batam	<b>800</b>	<b>387,400,000</b>	Kota Batam	<b>800</b>	<b>623,145,000</b>	
<b>2.08.06.2.01</b>	<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan</b>	<b>Persentase Lembaga Layanan Anak yang telah memenuhi standard PHA</b>	Kota Batam	<b>68%</b>	<b>387,400,000</b>	Kota Batam	<b>68%</b>	<b>623,145,000</b>	

	<b>Kabupaten/Kota</b>								
2.08.06.2 .01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	5 Dokumen	387,400,000	Kota Batam	5 Dokumen	623,145,000	
<b>2.08.07</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan</b>	Kota Batam	<b>100%</b>	<b>490,435,000</b>	Kota Batam	<b>100%</b>	<b>382,255,000</b>	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	Kota Batam	65%	101,500,000	Kota Batam	65%	101,500,000	
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan	Kota Batam	40 SDM	101,500,000	Kota Batam	40 SDM	101,500,000	

	pencegahan KTA	pencegahan KTA							
<b>2.08.07.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti</b>	Kota Batam	<b>65%</b>	<b>319,915,000</b>	Kota Batam	<b>65%</b>	<b>211,735,000</b>	
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Kota Batam	55 Layanan	162,000,000	Kota Batam	55 Layanan	53,820,000	Pemetaan Nomeklatur
2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Kota Batam	55 Layanan	157,915,000	Kota Batam	55 Layanan	157,915,000	

<b>2.08.07.2.03</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti /dirujuk</b>	Kota Batam	<b>30%</b>	<b>69,020,000</b>	Kota Batam	<b>30%</b>	<b>69,020,000</b>	
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Kota Batam	40 SDM	69,020,000	Kota Batam	40 SDM	69,020,000	
<b>2.14</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>		Kota Batam		<b>8,331,311,569</b>	Kota Batam		<b>8,565,753,499</b>	
<b>2.14.02</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK</b>	Kota Batam	<b>50%</b>	<b>353,200,000</b>	Kota Batam	<b>50%</b>	<b>333,900,000</b>	

2.14.02.2.01	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Persentase OPD yang telah mengakomodir rekomendasi GDPK dalam kebijakan</b>	Kota Batam	50%	40,000,000	Kota Batam	50%	20,700,000	
2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Batam	1 Dokumen	40,000,000	Kota Batam	1 Dokumen	20,700,000	
2.14.02.2.02	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi</b>	Kota Batam	100%/40%	313,200,000	Kota Batam	100%/40%	313,200,000	

2.14.02.2 .02.0009	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sistim informasi keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan penyelenggaraan sistim Informasi Keluarga	Kota Batam	12 Laporan	60,000,000	Kota Batam	12 Lapora n	60,000,000	
2.14.02.2 .02.0012	Pencatatan dan pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Batam	1 Laporan	253,200,000	Kota Batam	1 Lapora n	253,200,000	
2.14.03	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need</b>	Kota Batam	<b>82.00 / 9</b>	<b>4,336,651,600</b>	Kota Batam	<b>82.00 / 9</b>	<b>4,637,533,499</b>	
2.14.03. 2.01	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi</b>	Kota Batam	<b>100% / 45%</b>	<b>1,389,203,600</b>	Kota Batam	<b>100% / 45%</b>	<b>1,389,203,600</b>	

2.14.03.2 .01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Kepada Stake Holder dan Mitra kerja	Kota Batam	96 Organisasi	100,000,000	Kota Batam	96 Organisasi	100,000,000
2.14.03.2 .01.0012	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Batam	4 Dokumen	190,003,600	Kota Batam	4 Dokumen	190,003,600

2.14.03.2 .01.0013	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Batam	1 Dokumen	100,000,000	Kota Batam	1 Dokumen	100,000,000	
2.14.03.2 .01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan mini Lokakarya (Minilok)	Kota Batam	1 Laporan	180,000,000	Kota Batam	1 Laporan	180,000,000	

2.14.03.2 .01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kota Batam	1 Laporan	739,200,000	Kota Batam	1 Laporan	739,200,000	
2.14.03.2 .01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Kota Batam	1 Laporan	80,000,000	Kota Batam	1 Laporan	80,000,000	
<b>2.14.03.2.02</b>	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>Persentase tenaga lini/kader yang aktif</b>	Kota Batam	<b>70%</b>	<b>192,000,000</b>	Kota Batam	<b>70%</b>	<b>1,544,855,899</b>	
2.14.03.2 .02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Batam	542 Orang	192,000,000.00	Kota Batam	542 Orang	192,000,000.00	

2.14.03.2 .02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kota Batam	5 Laporan	0.00	Kota Batam	5 Laporan	1,352,855,899
2.14.03.2.03	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentase Faskes yang memenuhi standard pelayanan KB</b>	Kota Batam	83%	2,596,798,000	Kota Batam	83%	1,544,824,000

2.14.03.2 .03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Batam	12 Laporan	161,100,000	Kota Batam	12 Laporan	161,100,000	
2.14.03.2 .03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Batam	600 Orang	1,383,724,000	Kota Batam	600 Orang	1,383,724,000	0
2.14.03.2 .03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Batam	20 Unit	1,051,974,000	Kota Batam	20 Unit	0	0

<b>2.14.03.2.04</b>	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>Presentase kampung KB yang aktif</b>	Kota Batam	<b>70%</b>	<b>158,650,000</b>	Kota Batam	<b>70%</b>	<b>158,650,000</b>	
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kota Batam	13 Kampung KB	158,650,000	Kota Batam	13 Kampung KB	158,650,000	
<b>2.14.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif</b>	Kota Batam	<b>55%</b>	<b>3,641,459,969</b>	Kota Batam	<b>55%</b>	<b>3,594,320,000</b>	

2.14.04.2.01	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Persentase kelompok ketahanan Keluarga yang dibina</b>	Kota Batam	100%	3,641,459,969	Kota Batam	100%	3,594,320,000	
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Kota Batam	20 Unit	120,000,000	Kota Batam	20 Unit	120,000,000	
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Kota Batam	12 Laporan	94,259,969	Kota Batam	12 Laporan	47,120,000	

2.14.04.2 .01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Kota Batam	350 Orang	3,427,200,000	Kota Batam	350 Orang	3,427,200,000	
<b>TOTAL</b>					<b>29,748,664,591</b>			<b>26,641,022,622</b>	



## BAB IV PENUTUP

Demikian penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2023. Dan diharapkan akan tetap memberikan arah ataupun gambaran sebagai bentuk implementasi dari misi yang telah ditetapkan guna mewujudkan tujuan "*Meningkatkan Kesetaraan Gender serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak menuju keluarga yang mandiri*" serta sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam untuk periode berjalan yakni Tahun 2021-2026.

Selanjutnya, Rancangan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam ini selayaknya dievaluasi maupun monitor secara berkala sehingga apabila terjadi perubahan dapat dilakukan perbaikan – perbaikan seperlunya, sehingga secara umum dapat selaras dengan visi Kota Batam untuk dapat "*Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera*".

**Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk  
Dan Keluarga Berencana Kota Batam**



**Novi Harmadyastuti, S.Sos**

NP. 19761128 200212 2 006



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN**  
**ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA**  
**BERENCANA**  
**KOTA BATAM**

Jalan Raja Isa No.17 Gedung Bersama Lt.III Batam Center; Telp/Fax. (0778) 470692 Batam  
Email: bppakbbatam@gmail.com

Kode Pos: 29464

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,**  
**PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN**  
**KELUARGA BERENCANA**

**Nomor: 258/RP.01.01/VI/2024**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN**  
**TAHUN 2023**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA**  
**BATAM**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam tahun 2016-2021, perlu disusun dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan OPD untuk periode 1 (satu) tahun menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan Program Kegiatan Tahun 2024;

- a. Bahwa untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun Anggaran 2023, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) dengan menetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2023
- KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2023 terdiri dari pejabat dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2023 dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam,  
Pada tanggal 28 Juni 2024

**KEPALA DINAS**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Novi Harnadyastuti', written over a vertical line.

**Novi Harnadyastuti**

NIP. 19761128200212 2 006

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DP3APPKB  
KOTA BATAM  
TAHUN 2023**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM  
TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>		<b>JABATAN DALAM TIM</b>	
1	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM		PENGARAH	
2	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM		PENANGGUNGJAWAB	
3	KASUBBAG. PERENCANAAN PROGRAM DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM		SEKRETARIS	
I.	<b>PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>			
<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	NURHASANAH, SE	19800830 201001 1 003	Kabid. PUG dan Pemberdayaan Perempuan	Koordinator
2	FERA DARMAANTI, S.IP	19870211 201101 2 004	Kasi PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Anggota
3	NURUL YUNI, S.H	19740626 200212 2 005	Kasi PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum	Anggota
II.	<b>PEMENUHAN HAK ANAK</b>			

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	SRI YANTI, S.E, M.Si	19750210 200003 2 006	Kabid. Pemenuhan Hak Anak	Koordinator
3	SRI RAHMI FITRIANTY, S.E	19691210 200212 2 008	Kasi PHA di Bidang Pengasuhan, Alternatif Pendidikan dan Budaya	Anggota
3	ULFI RAMAYANTI, S.ST	19680611 198801 2 003	Kasi PHA di Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Anggota
<b>III.</b>	<b>PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN</b>			
<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	FISCA ANGGIANA, S.E	19710714 200003 2 007	Kabid. Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan	Koordinator
2	DEDY SURYADI, AKS, M.H	19670929 198803 1 009	Kasi Pencegahan & Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan	Anggota
3	HASRIATI, S.E	19741027 200901 2 004	Kasi Data, Informasi, Perempuan dan Anak	Anggota
<b>IV.</b>	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB</b>			
<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	MUTIARA AYU, S.IP	19870814 200701 2 002	Kabid. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator

2	Ir. INDAWATY WAKIDJO	19671102 199403 2 005	Kasi Advokasi, Informasi, Edukasi dan Pengendalian Penduduk	Anggota
3	LIBERTY LUCI PATIMANG, S.KM	19711216 199803 2 008	Kasi Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi	Anggota
<b>IV. KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA</b>				
<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	dr. DEWI MURNI	19751225 200604 2 029	Kabid. Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	Koordinator
<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	TEDDY SUHANDI, S.IP	19810610 200801 1 011	Kepala UPTD PPA	Koordinator
2	ROLIANA SIBURIAN, AMAK	19790320 200604 2 013	Kasubag. Tata Usaha UPTD	Anggota

**Batam, 28 Juni 2024**  
**KEPALA DINAS**

**Novi Harinadyastuti**  
NIP. 19761128 200212 2 006